DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Duadji, Noverman. 2012. Good Governance dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Mimbar Program Studi Administrasi Negara* FISIP Universitas Lampung. Lampung. Vol.8. No.2.(201-209).

Kurniawan, Robi., 2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. Jurnal Fiat Justisia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.10 Issue 3, 2477-6238.

Suhendar, A. 2020. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). Jurnal Wacana Kinerja: *Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik;* 13(2), 243-251.

Wahyudi, Eko. Dkk.,2017, Penialaian Kualitas Website E-Government Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dengan Dimensi e_GovQual. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang.

B. Buku /Laporan

Darmawan, D., & Fauzi, K. N. (2013). Sistem Informasi Manajemen. PT. Remaja Rosdakarya.

Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi Pemerintahan. Bandung. PT Refika Aditama

Koswara, E. (1998). Dinamika Informasi Dalam Era Global. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Napitupulu, Paimin, 2012, Pelayanan publik dan Customer Satisfaction, PT. Alumni, Bandung.

Rahardjo, Budi,. 2013. Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik. Jakarta: Pattiro dan AIPD untuk PCAI

Sinambela, Lijan Poltak, 2011, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

STIA-LAN. 2022. Pedoman Penyusunan Tesis. Makassar: STIA-LAN

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung CV Mandar Maju.

Tim Penyusun Kamus. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (3 ed.). Jakarta: Balai Pustaka

Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara*, Yogyakarta; Gava Media.

Wirartha, I Made.2006., Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: CV. Andi

C. PERATURAN

Luwu Timur. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Luwu Timur. Surat Keputusan Bupati Nomor: 202/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Luwu Timur. Surat Keputusan Bupati Nomor : 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Republik Indonesia. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Republik Indonesia. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, dan

D. Website

- www.luwutimurkab.go.id
- https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/
- https://bapelitbangda.luwutimurkab.go.id/index.php/berita
- https://bpbd.luwutimurkab.go.id/index.php/berita
- https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945